
GERAKAN ISLAM DI INDONESIA: SEJARAH FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME DARI ERA KOLONIAL HINGGA PASCA REFORMASI

Suardi Kaco. H¹, Sumarni²
kamarallingsuardi@yahoo.com
khalilah_nuril@gmail.com

¹Universitas Al Asyariah Mandar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Keyword:

*Islamic Movement,
fundamentalism,
radikalism*

ABSTRACT

This study explores the history of fundamentalist and radical movements in Indonesia, from the Colonial era to the post-reform period. To uncover and analyze data on this topic, this research employs a library research method with historical and sociological approaches. The findings of this study indicate that fundamentalist and radical movements began to emerge and develop from the Dutch colonial period through the post-reform era, with different organizations and movement patterns but sharing the same goal: establishing an Islamic caliphate (Islamic state). The emergence of these movements was driven not only by a textual-symbolic religious understanding as the primary factor but also by supporting factors such as politics, economy, society, and culture.

ARTICLE INFO

Keyword:

*gerakan islam,
fundamentalisme,
radikalisme*

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang sejarah gerakan fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia, dari era Kolonial hingga pasca reformasi. Untuk mengungkap dan menganalisis data-data mengenai hal itu, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis dan sosiologis. Dalam temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa Gerakan fundamentalisme dan radikalisme mulai muncul dan berkembang sejak zaman kolonialisme Belanda hingga pasca Reformasi, dengan organisasi dan pola gerakan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan khilafah Islamiyah (negara Islam). Penyebab munculnya selain karena pemahaman keagamaan tekstual-simbolik sebagai faktor utama, juga adanya faktor pendukung, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya

PENDAHULUAN

Fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam merupakan fenomena yang mempengaruhi perkembangan Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian, meskipun memiliki makna yang berbeda. Fundamentalisme mengacu pada pendekatan agama yang menekankan pemeliharaan nilai-nilai

dan doktrin-doktrin yang dianggap sebagai asas utama dalam agama. Sementara itu, radikalisme merujuk pada sikap atau pandangan yang cenderung ekstrem dalam mengejar perubahan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang tidak konvensional atau bahkan kekerasan.¹

Gerakan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Sejak era kolonialisme, Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Sejarah Islam di Indonesia telah ditandai oleh berbagai aliran dan gerakan, mulai dari aliran Sunni tradisional hingga gerakan modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun, pada beberapa dekade terakhir, muncul kelompok-kelompok yang mengadopsi pandangan fundamentalis atau radikal yang lebih keras.

Pada awalnya, masuknya pemikiran fundamentalis dan radikal ke Indonesia terjadi melalui proses globalisasi dan pengaruh negara-negara di Timur Tengah. Kelompok-kelompok Islam radikal mulai mendapatkan perhatian publik pada tahun 1990-an melalui serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaida. Serangkaian serangan teror seperti Bom Bali tahun 2002 dan serangan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009 mengguncang Indonesia dan memicu kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh gerakan radikal di negara ini.

Tulisan ini memiliki signifikansi yang penting dalam berbagai aspek. Salah satunya dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang dinamika sejarah Islam di Indonesia, terutama bagaimana fundamentalisme dan radikalisme muncul, berkembang, dan berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang terus berubah dari era kolonial hingga era pasca-reformasi. Kajian ini membantu mengungkap akar historis dari fenomena tersebut, yang sangat relevan untuk memahami pola perkembangan gerakan Islam saat ini.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kerangka analitis yang jelas dalam membedakan antara fundamentalisme sebagai usaha kembali ke nilai-nilai dasar agama dengan radikalisme yang seringkali melibatkan cara-cara ekstrem. Dengan perspektif sejarah yang mendalam, penelitian ini dapat membantu masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan memahami bagaimana berbagai faktor lokal dan global, seperti kolonialisme, modernisasi,

¹Askar Nur, "Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam", *Al Ubudiyah* 2, no. 1 (2021): h. 1-9

reformasi politik, dan globalisasi, memengaruhi orientasi dan tindakan gerakan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis data secara kualitatif dan deskriptif dengan berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan historis dan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Hindia Belanda: Awal Mula Munculnya Gerakan Islam Fundamentalisme dan Radikalisme

Nusantara sejak dulu menjadi panggung interaksi ideologi agama.² Salah satunya ideologi Islam Fundamentalisme dan radikalisme. Ideologi ini begitu bebas dan leluasa disebarkan di berbagai wilayah di Nusantara. Mereka berebut pengaruh, mengklaim ideologinya paling benar dan yang lain salah, sehingga konflik antar ideologi pun tak terhindarkan.

Benih-benih gerakan fundamentalisme dan radikalisme dapat ditelusuri pada masa Hindia Belanda. Jajat Burhanuddin menyatakan bahwa tanda-tanda awal fundamentalisme dan radikalisme mulai tampak pada abad ke-17 dan ke-18, ketika pengaruh Islam yang berfokus pada syariat semakin meningkat, dan kemudian semakin kuat pada abad ke-19. Salah satu dampak dari Islam yang berorientasi pada syariat ini adalah munculnya aktivisme dan gerakan pembaruan sosiomoral di kalangan umat Islam.³

Munculnya gerakan fundamentalisme dan radikalisme di Hindia Belanda dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor keagamaan, sosial-politik, pendidikan, dan reaksi terhadap modernitas. Misalnya, gerakan yang berorientasi pada syariat Islam dan pengaruh gerakan purifikasi global seperti Wahhabisme mendorong konsolidasi identitas keagamaan sebagai respons terhadap tekanan kolonial dan tantangan modernitas. Termasuk timbulnya ketidakadilan sosial, diskriminasi ekonomi, dan resistensi terhadap dominasi penjajah memicu keresahan yang diekspresikan melalui kerangka agama. Selain itu, kontak global melalui haji, perdagangan, dan pendidikan membawa ide-ide reformasi Islam yang lebih keras. Pesantren

²Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2009), h. 46.

³Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h.274.

sebagai pusat intelektual memperkuat ideologi resistensi, sementara ketegangan antara tradisionalisme dan modernisme menciptakan alienasi budaya yang mendorong umat kembali pada nilai-nilai fundamental agama.

Perang Paderi⁴ (1821-1827) adalah salah satu gejala dari gerakan fundamentalisme dan radikalisme di Minangkabau pada masa Hindia Belanda. Gerakan ini mulai muncul ketika tiga haji, yakni Haji Piobang, Haji Sumanik, dan Haji Miskin kembali dari Mekkah pada tahun 1803, dengan membawa paham Wahabi yang didapatkan selama 12 tahun bermukim di sana. Ketiga haji ini kemudian melancarkan semangat revivalisme Islam *ala* Wahabi, akan tetapi mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan kaum adat di Minangkabau.⁵ Awal konflik ini terjadi antara kaum Wahabi dengan kaum adat, karena terdesak sehingga keduanya meminta bantuan pihak Belanda.⁶ Namun, pihak Belanda lebih condong kepada kaum adat sehingga yang tadinya perang sipil menjadi perang melawan Belanda.⁷

Pada awal abad 20, berdiri dua organisasi keagamaan, yang dalam banyak aspek dapat dikategorikan sebagai organisasi pengusung paham fundamentalisme dan radikalisme, yakni: Al-Irsyad dan Persis (Persatuan Islam). Al-Irsyad (*Jam'iyat al-Islah wa al-Irshad*) berdiri pada 1915 oleh seorang ulama dari Sudan yang dididik di Haramain, Ahmad Muhammad Surkati (1875-1943). Organisasi ini bertujuan untuk mereformasi praktik keagamaan bagi komunitas orang-orang Arab di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa) untuk kembali pada al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Persis dibentuk tahun 1923 oleh kalangan pedagang di Bandung, dikembangkan oleh Ahmad Hassan (1887-1958), seorang keturunan Tamil kelahiran Singapura, yang pindah ke Jawa untuk mendirikan bisnis tekstil. Hassan mengoreksi praktik-praktik keagamaan tradisional yang dinilai takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ia juga menentang

⁴Pasca perang Paderi (1821-1827), terjadi perang Jawa atau Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903), dan pemberontakan Banten (1888). Tiga peristiwa setelah Paderi ini juga dilatarbelakangi oleh kepentingan agama, namun tidak memiliki hubungan dengan wahabi atau paham revivalisme Islam lainnya. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES), h. 9. Lihat juga Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elte Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 142-143.

⁵Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, h. 275. Lihat juga Mangaraja Onggang Parlindungan, *Tuanku Rao*, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 126.

⁶Greg Soetomo, "Radikalisme di Indonesia: Sejarah Rekonstruksi dan Dekonstruksi, *Indo-Islamika* 6 no. 1 (2016): h. 114.

⁷Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, h. 276.

visi nasionalisme, baginya, masyarakat muslim Indonesia tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan negara-bangsa, melainkan harus disatukan dalam satu *dawlah*.⁸

Menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, Partai Sarekat Islam dan Masyumi tampil sebagai pengusung pemikiran-pemikiran keislaman yang cenderung fundamentalis dan radikal dalam ranah politik kebangsaan. Tokoh politik seperti Agus Salim (Partai Sarekat Islam) dan Mohammad Natsir (Masyumi) mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pemikiran kedua tokoh politik itu mendapat kritikan dari tokoh nasionalis seperti Sukarno yang lebih menginginkan nasionalisme sebagai dasar negara Indonesia. Bahkan tercatat dalam sejarah bagaimana polemik antara Sukarno dan Natsir tentang rumusan dasar negara Indonesia, apakah Islam atau Nasionalisme.⁹

Polemik antara kaum Islamis dan Nasionalis berakhir ketika terwujud kompromi pada sidang BPUPKI 22 Juni 1945 dengan ditandatanganinya rancangan *preambul* yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*). Dalam Piagam Jakarta tersebut, sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.¹⁰ Meskipun Piagam Jakarta lahir atas kompromi antar kaum Islamis dan Nasionalis, namun keberadaan “tujuh kata” di belakang kata “ketuhanan” menunjukkan bahwa dasar negara yang disepakati lebih condong pada kepentingan agama tertentu, yakni agama Islam.

Apalagi semakin dipertajam ketika disepakati usulan dari kaum Islamis seperti Wahid Hasjim, Sukiman, Pratalyakra, dan Masjkur tentang “presiden harus beragama Islam dan Islam sebagai agama resmi negara” dalam rancangan UUD 1945 pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Misalnya, pasal 4 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”, Wahid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan kata-kata “yang beragama Islam”. Selain itu, ia juga mengusulkan agar pasal 29 tentang agama di dalamnya dicantumkan kata-kata “agama negara ialah agama Islam”.¹¹

⁸Greg Soetomo, “Radikalisme di Indonesia: Sejarah Rekonstruksi dan Dekonstruksi, *Indo-Islamika* 6 no. 1 (2016): h. 115. Lihat juga Carol Kersten, *A History of Islam in Indonesia*, Terj. Zia Anshor, *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara*, (Cet. I; Tangerang Selatan: BACA, 2018), h. 203-205.

⁹Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 226-228.

¹⁰J. Suyuti Pulungan, *Dialektika Islam, Negara, dan Pancasila*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 199.

¹¹J. Suyuti Pulungan, *Dialektika Islam, Negara, dan Pancasila*, h. 199-205.

Akan tetapi Piagam Jakarta tidak berumur panjang. Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta kembali digugat dalam sidang PPKI yang dibentuk Sukarno tanggal 7 Agustus 1945. Gugatan itu disampaikan oleh Mohammad Hatta dengan mengusulkan empat perubahan di dalam UUD 1945, yakni:

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.
2. Dalam Preambul (Piagam Jakarta) anak kalimat: “Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”¹²

Perubahan-perubahan yang dikemukakan Hatta di atas merupakan usulan yang disampaikan oleh opsir muda *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) mengenai keberatan pemeluk agama Protestan dan Katolik yang berada di wilayah Indonesia Timur perihal beberapa unsur Islami dari Piagam Jakarta. Jika usulan itu tidak diterima, maka para pemeluk Protestan dan Katolik akan memisahkan diri dari Negara Indonesia, dan membentuk negara sendiri.¹³

Penolakan pemikiran dan gerakan kaum Islamis tentang rumusan dasar negara Indonesia tidak saja berasal dari umat muslim sendiri, tetapi juga bersumber dari penganut agama lain. Penolakan ini tentu pertimbangannya bukan hanya pada aspek kemaslahatan agama, melainkan juga kemaslahatan bagi seluruh warga, bangsa, dan negara Indonesia.

Masa Orde Lama: Gerakan Separatis

Pasca kemerdekaan Indonesia 1945, Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno dan Hatta mendapat tantangan baru, yakni munculnya sejumlah gerakan separatis berhaluan agama yang menentang ideologi Pancasila dan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda. Pihak pemerintah menyebutnya sebagai pemberontak negara.

¹²J. Suyuti Pulungan, *Dialektika Islam, Negara, dan Pancasila*, h. 208.

¹³J. Suyuti Pulungan, *Dialektika Islam, Negara, dan Pancasila*, h. 209.

Gerakan-gerakan separatis yang radikal tersebut melakukan perlawanan dengan pemerintah dengan cara mengangkat senjata dan bergerilya di hutan-hutan.

Salah satu gerakan separatis yang radikal muncul pasca kemerdekaan adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). DI/TII berdiri pada pertengahan Februari 1948 di Cihaur, Sukabumi, Jawa Barat, atas kekecewaan Sukarmadji Marijan Kartosuwirjo terhadap keputusan Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville, yang di mana hasil perundingan tersebut dinilai menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak Indonesia.¹⁴

Gerakan DI/TII mengusung tegaknya Negara Islam Indonesia (NII) yang berasaskan pada al-Qur'an dan hadis. Cita-cita penegakan Negara Islam Indonesia diproklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Kartosuwirjo. Adapun isi proklamasi NII, yaitu: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami umat Islam dari rakyat Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia ini adalah Hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar."¹⁵

DI/TII mengusung dua misi utama, yaitu menyadarkan manusia sebagai hamba Allah dan menegakkan *Khalifah fil Ardhi* atau Negara Islam Indonesia. Bagi Kartosuwirjo, kelahiran NII merupakan kehendak Allah dan dalam pidatonya kerap kali menyebut kalimat "Negara Karunia Allah". Target operasi DI/TII adalah pihak pemerintah. Sengketa antara TII dan TNI berjalan semalam 13 tahun (1949-1962). Di antara aksi perlawanan yang dilakukan TII, yaitu menduduki dan merampok daerah-daerah yang dianggap musuh negara, merusak jaringan komunikasi dan transportasi, mensabotase penggulingan kereta dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sukarno.¹⁶

Selain itu, DI/TII juga membakar banyak rumah, masjid, dan pesantren di Jawa Barat. Bahkan membunuh para kiai, santri, dan warga yang beragama Islam. Masyarakat pedesaan sangat tertekan dan merasa takut, sebab di pihak DI/TII, masyarakat dituduh mendukung TNI

¹⁴Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008), h. 29, 34.

¹⁵B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Terj. Saafroedin Bahar, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, (Cet. I; Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 62.

¹⁶Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, h. 39-40.

karena tidak mau bergerilya. Sedangkan di pihak TNI juga kerap kali menuduh warga pedesaan sebagai anggota DI/TII karena sama-sama menganut agama Islam.¹⁷

Pengaruh DI/TII hingga Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Di Aceh, DI/TII dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh atau lebih dikenal Daud Beureuh. Ia mendukung dan memperjuangkan berdirinya NII karena menganggap bahwa Indonesia tidak berdasarkan pada hukum Islam. Hal itu terbukti dengan ditandatanganinya proklamasi berdirinya NII pada tanggal 21 September 1953 dengan bunyi “berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama umat Islam Indonesia, maka dengan ini nyatakan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian daripada Negara Islam Indonesia”.¹⁸

Di Kalimantan Selatan, DI/TII dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ia mendirikan organisasi kelaskaran bernama KRIyT (Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas) dan bergerilya di hutan untuk melawan pemerintah. Melalui KRIyT, Ibnu Hajar membentuk Departemen Umum dan Badan khusus penyebaran peneranan agama. Pasukan KRIyT dalam aksinya kerap mengancam penduduk desa untuk menjalankan dan mematuhi syariat Islam, yaitu salat lima waktu di masjid. Warga yang lalai melaksanakan akan diancam dan didenda sebesar Rp. 900-1.000. Selain itu, warga juga dipaksa untuk membayar zakat. Jika tidak membayar atau kurang harta zakat dibayar maka akan dihukum atau bahkan dirampok hartanya sebagai bentuk hukumannya.¹⁹

Di Sulawesi Selatan pengaruh DI/TII juga sangat kuat lewat Abdul Qahhar Muzakkar. Di setiap daerah dibentuk bataliyon, seperti di Bone, Palopo, Mandar, dan sebagainya. Pasukan DI/TII di Sulawesi bergerilya melawan TNI. Di daerah-daerah pedalaman mereka mendirikan markas sebagai pusat pergerakan. Penduduk daerah pedalaman yang masuk wilayah *de facto* DI/TII dipaksa untuk mengikuti aturan hukum Islam. Misalnya, di daerah Mandar, perempuan harus menutup aurat, jika kedapatan tidak berhijab, maka akan dipotong rambutnya hingga botak; pelaku zina akan ditanam hingga dada dan dilempari batu kepalanya sampai mati; dilarang berziarah ke makam; dilarang mengenakan pakaian cap buaya (simbol barat); dilarang

¹⁷Ade Firmansyah, *SM. Kartosoewirjo: Biografi Singkat 1907-1962*, (Cet. II; Jogjakarta: Ar-Suzz Media, 2011), h. 70.

¹⁸Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, h. 95.

¹⁹Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, h. 147.

makan ikan segar, penduduk harus makan ikan kering; dan dilarang keluar wilayah kota. Larangan-larangan tersebut jika dilanggar, selain dihukum juga akan dicap sebagai kafir.²⁰

Jika diamati visi dan misi pergerakan DI/TII di Sulawesi, nampak bahwa mereka sangat keras dalam memperjuangkan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Abdul Qahhar Muzakkar menentang ideologi Pancasila yang dirumuskan oleh Sukarno dan pendiri bangsa lainnya. Hal itu dapat dibaca dalam pandangannya tentang Pancasila yang dirujuk dari pemikiran Hasan Saleh, tokoh DI/TII Aceh, ia mengatakan bahwa Pancasila akan membahayakan kedudukan keagamaan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Jika Pancasila dibiarkan tersebar, maka umat Islam akan murtad.²¹

Masa Orde Baru: Gerakan "Bawah Tanah"

Gerakan fundamentalisme dan radikalisme masa Orde Baru tidak muncul ke permukaan, tetapi bergerak di bawah tanah. Hal itu disebabkan oleh politik represif Soeharto terhadap gerakan dan pemikiran Islam politik yang dinilai dapat mengancam stabilitas politik dan kekuasaan.

Salah satu organisasi yang lahir di tengah situasi politik represif Orde Baru adalah DDII (*Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*). Organisasi ini merupakan wajah baru Masyumi, berdiri pada Mei 1967 oleh tokoh Masyumi, Mohammad Natsir. Lewat organisasi DDII, Natsir ingin memperjuangkan kembali Piagam Jakarta dengan strategi dakwah. Anggota-anggota DDII melakukan gerakan purifikasi Islam, menentang tradisi-tradisi lokal, dan mempertahankan umat Islam dari ancaman kristenisasi, semua itu untuk tujuan politik. Terkait misi politik DDII, Natsir pernah berkata, "sebelumnya, kita menjalankan dakwah melalui politik; sekarang, kita mengejar politik melalui dakwah".²²

Lewat Natsir, DDII membangun jejaring dengan organisasi *Rabitat al-A'Alam al-Islami* (Liga Dunia Islam), sebuah organisasi yang berdiri pada 1962 di Mekkah dengan dukungan dana dari Pemerintah Arab Saudi. Rabitat kemudian dijadikan sebagai kendaraan untuk menyebarkan pemikiran Wahabi di dunia Islam, termasuk di Indonesia dengan melalui

²⁰Wawancara dengan Pua Keba (80-an) tanggal 22 November 2021.

²¹Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 2005), h. 289.

²²M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java*, terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, (Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012), h. 278. Lihat juga Greg Soetomo, "Radikalisme di Indonesia: Sejarah Rekonstruksi dan Dekonstruksi, *Indo-Islamika* 6 no. 1 (2016): h. 119.

DDII. Di Indonesia, DDII menyelenggarakan banyak pelatihan kepada para pendakwah, membantu pembangunan masjid, membagi-bagi mushaf al-Qur'an secara gratis, mensponsori dan menyebarkan terjemahan karya-karya Wahabi, pemikiran Abu 'I-a'la Mawdudi, dan pemikiran Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Dalam perkembangannya, gerakan DDII banyak diminati bagi kalangan mahasiswa di universitas-universitas negeri dengan membentuk kelompok-kelompok kajian keagamaan.²³

Pada dekade 1970-an, DDII dengan bantuan dana dari Wahabi membiayai banyak mahasiswa Indonesia belajar ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Alumni-alumni program ini kembali ke Indonesia untuk menyebarkan paham Wahabi. Tidak sampai di situ, DDII juga mendirikan LIPIA dengan bantuan dana dari Wahabi, dan mayoritas alumninya berperan sebagai agen salafi dan melakukan penyusupan di berbagai tempat di Indonesia.²⁴

Ketika situasi politik perlahan berubah pada tahun 1980-an, yang ditandai dengan sikap pemerintah Orde Baru mulai akomodatif terhadap organisasi-organisasi keagamaan, timbul sejumlah gerakan radikal-ekstremis di berbagai tempat. Pada dekade ini, serangkaian aksi terorisme, seperti pemboman gereja, pemboman tempat-tempat hiburan, Candi Borobudur, dan bank-bank milik kroni Soeharto, yang diketahui digerakkan oleh organisasi Komando Jihad dan Kelompok Teror Warman, yang pimpinannya merupakan veteran Darul Islam 1960-an.²⁵ Menurut Sidney Jones, selain mereka melakukan aksi di Indonesia, juga mereka pergi ke Afghanistan untuk ikut berperang melawan Uni Soviet sekaligus untuk persiapan melawan represif Soeharto.²⁶

Pada dekade ini, dua tokoh revivalis yang kerap kali tampil kontroversi adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya merupakan pengusung pemikiran Sayyid Qutb dan Hassan al-Banna di Indonesia. Pada tahun 1970, keduanya mendirikan Radio Dakwah Islamiyah Solo, namun dibubarkan pemerintah tahun 1975. Dan tahun 1972, keduanya juga

²³Mohammad Natsir termasuk salah seorang pendiri organisasi Liga Dunia Islam dan sekaligus menjabat sebagai wakil presiden pada organisasi tersebut. Lihat M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java*, terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, h. 278-279.

²⁴Abdurrahman Wahid, Ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika kerja sama the Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009), h. 95.

²⁵Greg Soetomo, "Radikalisme di Indonesia: Sejarah Rekonstruksi dan Dekonstruksi, *Indo-Islamika* 6 no. 1 (2016): h. 121.

²⁶Yudha Pratama Jaya, "Radikalisme Sekarang Lebih Terbuka Dibandingkan Zaman Orba, Media Antara, diakses 10 Juni 2023.

mendirikan Pondok Pesantren al-Mukmin di Desa Ngruki, Surakarta. Melalui pendidikan pesantren, keduanya menyebarkan pemikiran-pemikiran purifikasi Islam dan politik Islam untuk penegakan Negara Islam. Bagi pandangan Sungkar dan Ba'asyir, Indonesia wajib memiliki hukum syariah sebagai konstitusi yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, seperti potong tangan bagi pencuri dan hukum rajam bagi pezina. Keduanya juga berpandangan bahwa Indonesia bukanlah negara damai (*dar al-salam*) tetapi negara perang (*dar al-harb*) sehingga jihad adalah sesuatu yang legal ditegakkan.²⁷ Ba'asyir dalam berbagai kesempatan kerap mengeluarkan ancaman, "Jika pemberlakuan syariat Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad, berjihad untuk melawan kaum kafir yang menghalangi dan menentang berlakunya syariat Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia".²⁸

Pada tahun 1976, Sungkar dan Ba'asyir membangun jejaring dengan para veteran Darul Islam. Perkenalannya dengan sisa-sisa gerakan Darul Islam, membuat keduanya semakin keras dalam menegakkan misi politiknya. Ba'asyir lalu mendirikan Jemaah Islamiyah (JI) sebuah organisasi teroris bawah tanah. Pada tahun 1979 keduanya ditangkap atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret di Surakarta. Setelah bebas, keduanya melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985 dan kembali ke Indonesia setelah rezim Orde Baru tumbang 1998.²⁹

Masa Pasca Reformasi: Gerakan Militansi dan Terorisme

Periode pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran kebebasan, muncul berbagai organisasi berideologi fundamentalis dan radikal, baik berbentuk partai politik maupun organisasi sosial-keagamaan. Kemunculan organisasi-organisasi berhaluan keras ini bagaikan jamur di musim hujan. Tercatat dari Mei 1998 sampai April 1999 terdapat 42 partai politik berideologi Islam, dan sejumlah organisasi seperti Lasykar Jihad, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Komunikasi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Forum Umat Islam, Komite Persiapan Penerapan Syari'ah Islam (KPPSI), dan Hizbut Tahrir Indonesia.³⁰

²⁷M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java*, terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, h. 312.

²⁸Abdurrahman Wahid, Ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 135.

²⁹M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java*, terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, h. 313.

³⁰Sri Mulyati, "Pertarungan Pemikiran NU dan Kelompok Islam Lain" *Taswirul Afkar*, no. 21 (2007): h. 18.

Jika pada masa Orde Baru organisasi-organisasi berhaluan fundamentalis dan radikalisme tersebut bergerak di bawah tanah atau secara tidak terang-terangan, maka di era pasca reformasi, organisasi-organisasi ini bergerak secara bebas. Mereka memanfaatkan sistem demokrasi untuk leluasa menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka kepada masyarakat. Mereka dengan sangat mudah berinfiltrasi ke institusi-institusi pemerintahan maupun swasta, perguruan tinggi, sekolah, hingga merangsek masuk ke desa, dan menguasai masjid-masjid yang ada di desa.

Mereka melakukan penyusupan dengan pola yang sangat beragam, seperti pendekatan finansial, memberikan layanan kebersihan gratis di masjid-masjid, bahkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan akademik. Termasuk mereka sempat menawarkan proposal kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan dana sebesar 500 juta dollar AS. Dari dana itu, 40% digunakan oleh Kabinet RI sementara mereka memakai 60% untuk melaksanakan program pendidikan akhlak terutama di wilayah Sulawesi Tengah yang baru saja mengalami konflik bersenjata yang melibatkan kelompok-kelompok radikalisme di dalamnya.³¹

Pendekatan finansial memang kerap digunakan untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan di sejumlah institusi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang ditemukan oleh peneliti buku “Ilusi Negara Islam”, di mana dalam buku itu disebutkan terdapat dua orang asal Arab Saudi menemui Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan menawarkan sejumlah CD berisi buku-buku Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua orang tersebut menyodorkan uang untuk menggunakan nama UIN Sunan Kalijaga sebagai penerbit buku-buku tersebut. Tawaran itu ditolak oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga karena tahu bahwa buku-buku itu mengandung paham ekstrem yang membahayakan eksistensi agama, bangsa, dan negara Indonesia.³²

Selain penyebaran paham keras yang dilakukan oleh organisasi-organisasi transnasional maupun lokal, juga muncul aksi-aksi teroris di berbagai tempat di Indonesia. Tercatat ledakan bom di Kedubes Filipina tahun 2000; di Bursa Efek, Jakarta tahun 2001; di Gereja Santa Anna dan Gereja HKBP, Jakarta Timur tahun 2001; di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega,

³¹Abdurrahman Wahid, Ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 97.

³²Abdurrahman Wahid, Ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 98.

Semarang tahun 2001. Dan yang paling mengerikan adalah kasus bom Bali 2002 dan 2005 yang dipimpin oleh Dr. Azahari bin Husin dari Malaysia bersama dengan Noordin Mohammad Top. Dr Azahari kemudian meledakkan diri ketika digrebek oleh Densus 88 di Kota Batu pada November 2005, sedangkan Noordin M. Top tewas ditembak oleh Densus 88 di Temanggung, Kamis 17 September 2009. Kedua otak bom Bali ini merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.³³

Keberhasilan menumpas teroris Dr. Azahari dan Noordin M. Top tidak membuat aksi terorisme di Indonesia berhenti, melainkan gerakan ini dilanjutkan oleh anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya. Misalnya, aksi bom bunuh diri terjadi tahun 2009 di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott serta di beberapa tempat lainnya. Pada tahun 2011 terjadi peledakan bom di Utan Kayu, Jakarta Timur; aksi bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon; ancaman peledakan bom di perumahan Alam Sutra, Gading Serpong, Tangerang Selatan; aksi bom bunuh diri di GBIS Kepuntren, Solo, Jawa Tengah. Beberapa tahun kemudian, yakni tahun 2016 terjadi peledakan bom di Sarina-Thamrin dan juga peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur tahun 2017³⁴ serta pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar tahun 2021.

Setelah Osama bin Laden tewas dari serangan tentara AS, Jamaah Islamiyah (JI) kemudian berafiliasi ke *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Timur Tengah. Sejumlah anggota JI dikirim ke Suriah untuk berjuang bersama ISIS, sementara sebagian anggota lainnya tetap di Indonesia untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok teroris yang masih tersisa, seperti kelompok Agus Santoso yang bergerly di Poso, Sulawesi Tengah, dan ada juga kelompok yang dipimpin oleh Bahrin Naim dari Suriah. Mereka dalam melakukan aksi teror mendapatkan bantuan dana dari pihak ISIS.³⁵

SIMPULAN

Fundamentalisme merupakan ideologi yang mengusung pemahaman tekstual dan simbolik terhadap hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan radikalisme adalah ideologi yang mengusung paham tekstual dan menerapkannya dengan cara-

³³Iskandar Agung dan Amrazi Zakso, *Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah*, (Cet. I; Bogor: Penerbit IPB Press, 2018), h. 29,30,32.

³⁴Iskandar Agung dan Amrazi Zakso, *Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah*, h. 32.

³⁵Iskandar Agung dan Amrazi Zakso, *Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah*, h. 33.

cara kekerasan. Jadi, fundamentalisme dan radikalisme tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait. Begitu pula dengan terorisme yang lahir dari rahim radikalisme dan fundamentalisme.

Gerakan fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia sejak dulu sudah ada, dari masa Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca Reformasi. Di masa Hindia Belanda, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Hindia Belanda dan juga terhadap masyarakat yang dinilai mempraktikkan agama puritan. Di masa menjelang kemerdekaan, gerakan ini terlibat di dalam perumusan dasar negara Indonesia dan berhasil menetapkan Piagam Jakarta sebagai konstitusi negara Indonesia meskipun dirubah pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Pasca kemerdekaan, gerakan ini mewujud dalam gerakan pemberontakan seperti DI/TII yang memperjuangkan tegaknya Negara Islam Indonesia (NII). Di masa Orde Baru, gerakan fundamentalisme dan radikalisme bersifat rahasia, tidak terang-terangan karena tekanan politik Orde Baru, yang melarang organisasi yang tidak berhaluan Pancasila. Di masa Pasca reformasi, gerakan ini bergerak secara massif, menyusup ke berbagai tempat, dan banyak melakukan aksi-aksi kekerasan dan pemboman di beberapa tempat. Kemunculan gerakan ini disebabkan banyak factor, selain pemahaman tekstual-simbolik terhadap teks keagamaan, juga disebabkan politik global, situasi nasional seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Iskandar dan Amrazi Zakso, *Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah*, Cet. I; Bogor: Penerbit IPB Press, 2018.
- Arif, Syaiful, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Terj. Saafroedin Bahar, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, Cet. I; Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Burhanuddin, Jajat, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- , *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elte Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Firmansyah, Ade, *SM. Kartosoewirjo: Biografi Singkat 1907-1962*, Cet. II; Jogjakarta: Ar-Suzz Media, 2011.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 2005.

- Jaya, Yudha Pratama, “Radikalisme Sekarang Lebih Terbuka Dibandingkan Zaman Orba, Media Antara, diakses 10 Juni 2023.
- Kersten, Carol, *A History of Islam in Indonesia*, Terj. Zia Anshor, *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara*, Cet. I; Tangerang Selatan: BACA, 2018.
- Maarif, Ahmad Syafi’I, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2009.
- Mulyati, Sri, “Pertarungan Pemikiran NU dan Kelompok Islam Lain” *Taswirul Afkar*, no. 21 (2007): h. 18.
- Nur Askar, “Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam”, *Al Ubudiyah* 2, no. 1 (2021): h. 1-9
- Parlindungan, Mangaraja Onggang, *Tuanku Rao*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Pulungan, J. Suyuti, *Dialektika Islam, Negara, dan Pancasila*, Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Ricklefs, M.C., *Islamisation and Its Opponents in Java*, terj. FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012.
- Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet. I; Jakarta: LP3ES.
- Soetomo, Greg, “Radikalisme di Indonesia: Sejarah Rekonstruksi dan Dekonstruksi, *Indo-Islamika* 6 no. 1 (2016)
- Wahid, Abdurrahman, Ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika kerja sama the Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009.